

## The Role of Muhammadiyah Organization in Indonesia Education Reform on 1912-1923

Fitria Eka Imsawati<sup>1</sup>, Bambang Soepeno<sup>2</sup>, Kayan Swastika<sup>3</sup>

<sup>123</sup>History Education Program, The University of Jember.  
Email : fitriaeca.FEI@gmail.com.

### Abstract

Muhammadiyah is an organization that makes their movement on socio-religious reform. Muhammadiyah is supported by society as a non-political organization that concerns about charity and education. Muhammadiyah always conducts reform in every aspects especially in education. The problem in this research is how was the education system in Indonesia right before Muhammadiyah was founded, how were the effort and action that Muhammadiyah did at that time on the reform of education and it's effects. The purpose of this research is to describe about the role of Muhammadiyah in the reform of the education in 1912-1923. The research method used in this research is historical research method with educational sociology approach and open system organizational theory. The benefit of this research is to be expected to add the knowledge and information about Muhammadiyah and as a source of learning about that organization. The other benefit is this research can be used as a source for the other similar researches on the future. The first conclusion of this research is education system in Indonesia right before Muhammadiyah was founded, educational secularism, and Islamic educational traditionalism. The second conclusion is the attempt and action that Muhammadiyah did at that time on the reform of education was the implementation of principal of education, the combination of western and traditional education in the education that was conducted Muhammadiyah. The last conclusion is the effect of reform in education conducted by Muhammadiyah on the society namely integralistics and contextual teaching and learning model and arose of the modern figures like KH. Abdul Razzaq Fachruddin, H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), and M. Rasjidi.

Keywords: role, Muhammadiyah Organization, education reform

## PENDAHULUAN

Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan (Sutarno, 2005: 33). Kehidupan K.H. Ahmad Dahlan telah memberikan inspirasi tentang berdirinya Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah terus mengadakan pembaharuan disegala bidang diantaranya tajdid, sosial, budaya, khususnya dalam pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama. Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pendidikan dan agama dapat kita rasakan dan lihat sampai sekarang. Hadirnya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar luas didaerah-daerah dan antusias masyarakat terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah, menandakan bahwa Muhammadiyah dalam pendidikan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum.

Pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam diawali daerah Minangkabau, disusul pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Gagasan Politik Etis yang diterapkan Belanda dalam bidang pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari tujuan mengembangkan agama Kristen di Indonesia dan melemahkan Islam (Hamka, 1986:111-112). kebijakan Politik Etis tampak memberikan harapan-harapan baru bagi penduduk pribumi untuk memperbaiki taraf haidup melalui kesempatan memperoleh pendidikan. Organisasi Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pembaharuan dengan pola pemikiran yang berorientasi kedepan, tetapi tidak meninggalkan keimanan. Pendidikan yang diselenggarakan Organisasi Muhammadiyah diharapkan mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pendidikan Barat yang diperkenalkan kepada kelompok pribumi secara terbatas telah menciptakan kelompok intelektual dan profesional yang mampu melakukan perubahan-perubahan dan memunculkan ide-ide baru masyarakat ataupun sikap terhadap kekuasaan Belanda (Muhammadiyah, 1995: 11). munculnya ide-ide baru inilah yang melatarbelakangi berdirinya lembaga-lembaga dan oragnisasi di tanah air, seperti Organisasi Budi Utomo yang menandai pergerakan nasional. Pergerakan Nasional telah memunculkan kesadaran dikalangan ulama pendidik Islam, setelah sekian lama terpuruk dibawah kekuasaan kolonial, tidak

terkecuali K. H. Ahamad Dahlan. K.H.Ahmad Dahlan mengupayakan pendidikan yang diselenggarakan Organisasi Muhammadiyah adalah pendidikan agama dengan menggunakan sistem pendidikan moderen yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya Organisasi Muhammadiyah; bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 serta bagaimana dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah bagi masyarakat Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah: menganalisis sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya Organisasi Muhammadiyah; menganalisis usaha atau tindakan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 serta menganalisis dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah bagi masyarakat di Indonesia. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir, memecahkan masalah secara kritis dan logis, menambah wawasan tentang gerakan modernisasi Islam pada umumnya dan menambah wawasan tentang Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923; bagi pembaca, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923; bagi calon guru sejarah, dapat menambah penguasaan materi Sejarah Nasional Indonesia dan memperkaya materi sejarah bangsa Indonesia; bagi almamter FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian serta dapat menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri empat langkah, yaitu: pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis dan sintesis (interpretasi) dan penulisan (Historiografi).

Langkah pertama, pengumpulan data (Heuristik), dalam langkah ini penulis mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan peranan organisasi Muhammadiyah sekitar tahun 1912-1923. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library research*). Langkah kedua, kritik sumber untuk mengkaji otentitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern (Kartodirjo, 1992: 16).

Langkah ketiga, interpretasi dapat diartikan sebagai fakta-fakta sejarah yang ditentukan guna memperluas pola-pola dan teori-teori sejarah serta mengkonstruksi makna-makna dari sejarah (Thompson, 2012: 267). peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah secara kronologis, menghubungkan antara fakta satu dengan yang lainnya sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional berdasarkan permasalahan yang akan dibahas: sistem pendidikan menjelang berdirinya Organisasi Muhammadiyah, usaha atau tindakan Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan tahun 1912-1923 dan dampak dari pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Langkah terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap penulisan untuk merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi menjadi kisah berdasarkan fakta sejarah yang berkaitan dengan “Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pendidikan di Indonesia Menjelang berdirinya Organisasi Muhammadiyah**

#### **1. 1. Sekularisme Pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda di bagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu masa kekuasaan VOC

(*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), mendirikan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan sebagai ganti dari agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis. Periode kedua, yaitu pendidikan pada masa pemerintahan kolonial. Masa pemerintahan kolonial Belanda terjadi pergantian sistem politik, khususnya dalam sistem pendidikan.

Awal abad 19 pemerintah Belanda hanya memberikan pengajaran kepada penganut agama Kristen dikalangan penduduk pribumi, supaya mereka dapat membaca kitab Injil . pemerintah Belanda menyerahkan hal pengajaran kepada Gereja, swasta dan badan-badan kesejahteraan sosial. Pembatasan pengajaran yang terakhir hilang pada tahun 1863, menteri Fransen Van De Putte telah menetapkan agar penduduk pribumi mendapat kesempatan untuk memperoleh pengajaran (Brugmans dalam Baudet & I.J. Brugmans, 1987: 178-179). Perluasan pengajaran bagi penduduk pribumi mengalami banyak kesulitan, karena penduduk tidak menyadari kegunaan sekolah.

Awal abad 20 kebijakan politik dinegeri Belanda mengalami perubahan. Berkuasanya kaum liberal memunculkan banyak tokoh yang berubah dan mempengaruhi kebijakan Belanda di Hindia Belanda. Berubahnya kebijakan Belanda di Hindia Belanda tidak terlepas dari peranan tokoh: Van Deventer, P. Brooshoofd, dan Van Limburg Stirum, yang menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan di Hindia Belanda yang dikenal dengan politik etis (Niel, 1984: 21). Ide- ide politik etis antara lain adalah irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Pendidikan memiliki skala yang sangat penting melihat populasi masyarakat pribumi, sehingga mereka berpikir untuk memajukan dan meningkatkan pendidikan masyarakat Pribumi ( Niel, 1984: 55). pendidikan masyarakat Hindia Belanda diarahkan dari ketidak matangan yang dipaksakan agar berdiri di kaki sendiri. Pengajaran yang diberikan menghasilkan tamatan yang siap menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia dibawah pengawasan Belanda. Kesempatan Belajar dengan jumlah sekolah yang masih terbatas, merupakan suatu kelangkaan apalagi untuk masuk sekolah sistem Belanda. Pendidikan secara resmi hanya memberikan gambaran adanya tugas dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap pembinaan pendidikan rakyat di wilayah jajahannya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, umumnya mencerminkan kekuatan dan kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi bukan dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat Hindia Belanda, melainkan sekedar memberi kesempatan keluarga golongan tertentu untuk ikut serta dalam mempertahankan kelangsungan hidup kolonial. Tahun 1904-1909 pandangan tentang pendidikan memperoleh dukungan dari pihak pemerintah Belanda. Tahun 1907 bahasa Belanda dimasukkan sebagai mata pelajaran disekolah kelas Satu, masa belajar diperpanjang menjadi enam tahun. Sejak bahasa Belanda diajarkan disekolah kelas satu ditiap sekolah diangkat dua orang guru Belanda. Lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah Belanda bersifat sekuler dalam artian pelajaran agama atau semangat beragama tidak diberikan dalam pelajaran, dikarenakan bangsa Belanda tidak mau mencampuri kebudayaan masyarakat pribumi. Pelajaran agama Islam tidak diberikan karena kebijakan kolonial Belanda yang tidak mau mencampuri agama Islam. Sesuai dengan prinsip pendidikan pemerintah kolonial Belanda yaitu pemerintah Belanda berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu. Penerapan politik kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri meliputi: 1) *gradualisme*; 2) *dualisme*; 3) kontrol sentral yang kuat; 4) keterbatasan tujuan; 5) prinsip konkordasi; 6) perencanaan pendidikan tidak sistematis (Salindri, 1996: 28).

## 1. 2. Tradisionalisme Pendidikan Islam

Pendidikan pesantren telah ada di Jawa sejak sebelum Islam masuk (Soetedja, 1956: 24). perkembangan dalam Islam dipengaruhi sikap keberagaman dalam masyarakat yang dipengaruhi mitologi (mitos) menjadi penyebab utama kelemahan akidah dan semangat beragama. Kepercayaan yang masih ada dalam diri umat Islam yaitu adanya kepercayaan terhadap paham *Hinduisme* dan *Animisme*. Pendidikan pesantren adalah pendidikan pengajian Al-Qur'an dilanggar-langgar (surau). Pesantren adalah lembaga sosial dibidang pendidikan keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan serta menyebarluaskan agama Islam.

Dualisme pendidikan yang berakar dari politik segregasi (pemisahan) di bidang pendidikan pada masa kolonial Belanda. Segregasi dalam pengelolaan

pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari pemerintah kolonial Belanda, ketika dikeluarkannya *Koninklijk Belsuit* (keputusan kerajaan) tanggal 21 September 1866 yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlandsch- Indie* / lembaran negara Hindia Belanda 1886 no. 127. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah Belanda membentuk empat departemen, salah satunya adalah *Departemen Van Onderwijs, Eeredienst, en Njirverheid/ OEN* (departemen pendidikan, Ibadah, dan industri kerajinan) tahun 1863. lembaga-lembaga Islam yang tidak diakui sebagai bagian dari OEN diurus oleh Kantor Urusan Bumiputera (*Kantoor voor indlandsch Zaken*). Kantor ini dibentuk sebagai kantor penasihat untuk perkara pribumi (Steenbrink, 1994: 85).

Belanda menjalankan politik asosiasi pendidikan, dengan mendirikan sekolah untuk masyarakat pribumi. Namun terjadi deskriminasi dalam pelaksanaannya (Suminto, 1986: 41). Perkembangan selanjutnya didirikan sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang memberikan jalan kearah terwujudnya pendidikan umum. Sekolah desa salah satunya berasal dari sekolah *Zending*. Belanda bersifat netral terhadap agama dalam artian tidak mencampuri dan tidak memihak salah satu agama. Pernyataan tersebut tertuang dalam undang-undang dasar Belanda *Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indie* yang berlaku mulai tahun 1955, dalam artikel 119 bahwa: “setiap orang memeluk agama masing-masing dengan kebebasan sepenuhnya, termasuk perlindungan masyarakat dan anggota-anggotanya terhadap pelanggaran peraturan-peraturan umum dibidang hukum pidana ( Pijper dalam Baudet & I.J.Brugmans, 1987: 239).

Pemerintah Belanda menjauhkan diri dari campur tangan terhadap Islam. Tahun 1865 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan tentang pembangunan masjid yang tertuang dalam *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie*, no. 174 bahwa: “negara dengan sendirinya tidak semestinya campur tangan dengan pembangunan atau dengan perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan suci agama Islam ( Pijper dalam Baudet & I.J. Brugmans, 1987: 239). Tahun 1882 pemerintah belanda memebentuk sebuah badan khusus yang bertugas membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Piesteraden*, dengan dikeluarkannya ordonasi guru tahun 1905. Pemerintah

Belanda mengeluarkan kebijakan pembatasan pergi haji dan mengawasi masyarakat Hindia Belanda yang pergi haji selama beribadah sampai kembali ke tanah air. Ordonansi guru menimbulkan keresahan guru agama atau madrasah, karena mengharuskan para guru mendapatkan izin dan melapor kepada petugas yang berwajib dalam memberikan pengajaran dirasa menyulitkan. Pengawasan Belanda terhadap guru, murid dan pesantren yang sangat ketat membuat pesantren anti Belanda. Secara kultural mereka menolak semua kebudayaan Barat, tidak mau menggunakan huruf latin dan menolak ilmu-ilmu yang berasal dari barat.

Keterbelakangan pendidikan Islam dipengaruhi materi dan metode pengajaran yang diterapkan di surau-surau yang hanya mewajibkan murid-murid untuk membaca, sedangkan yang dapat memahami kalimat dan memberi penjelasan hanyalah guru. Cara belajar dan mengajar di pesantren menggunakan sistem *sorongan* dan *weton*. Muncul dan berkembangnya sekolah barat menimbulkan permasalahan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot dan ketinggalan zaman (Gunawan, 1986: 22). awal abad 20 bangkitlah sejumlah pembaharu di Indonesia yang dipelopori oleh golongan terpelajar dan ulama di Indonesia. Latar belakang pembaharu dilatar belakangi oleh kehidupan siswa di pesantren (tradisional) yang tersaingi secara ketat oleh murid-murid sekolah priyayi yang didirikan Belanda, mendorong pemuka agama Islam di Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan baru yang diberi nama madrasah. Tujuan pembaharu pendidikan dan pengajaran Islam tidak pernah dinyatakan secara tegas, akan tetapi tujuan pembaharuan pendidikan dan pengajaran Islam adalah untuk memperbaiki keadaan pendidikan dan pengajaran Islam baik segi metode pengajaran, cara penyelenggaraan maupun materi pendidikannya.

## **Usaha atau Tindakan yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923**

### **1. 1. Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah**

Pendidikan diharapkan bersifat *humanis-religius* dimana dalam pengembangan kehidupan (ilmu pengetahuan) tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. *Humanis -Religius* dapat dipenuhi dalam struktur



kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Pengembangan dan pembaharuan pendidikan Muhammadiyah diperlukan penajaman ciri pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Islam. prinsip pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah disesuaikan dengan prinsip yang mendasar pada Al Qur'an dan Sunnah. Maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi keagamaan yang tidak terlepas dari pandangan Muhammadiyah tentang kedudukan dan fungsi Al Qur'an dan Sunnah; akal dan tata kehidupan sosial.

Pendidikan Muhammadiyah menggunakan prinsip *Tajdid* , karena masyarakat terlalu dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan. Prinsip integrasi yang dilakukan Muhammadiyah dalam pendidikan menunjukkan respon positif terhadap perkembangan dunia pendidikan diluar lingkungannya, serta untuk bersaing dengan pendidikan yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang dianut berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Bidang pendidikan mengalami transformasi dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitasnya sebagai gerakan dakwah.

## **1. 2. Perpaduan Pendidikan Barat dengan Pendidikan Pesantren dalam Pendidikan Muhammadiyah**

Kegagalan pendidikan Islam merespon kemajuan zaman, sehingga tidak dapat bersaing dengan lembaga pendidikan kolonial menyebabkan pendidikan Islam semakin terisolasi. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial sangat sekuler, pelajaran agama tidak diberikan. Penyelenggaraan pendidikan tradisional yang terbatas pada pesantren yang hanya memberikan pelajaran agama. Akibat adanya dualisme pendidikan muncullah konfrontasi yang berkepanjangan dalam tata kehidupan, cara berfikir, dan kebudayaan masyarakat yang dihasilkan oleh masing-masing sistem. Berdasarkan keprihatinannya, K. H. Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah melakukan pembaharuan pendidikan dengan mengabungkan kedua sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan

moderen, sehingga akan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berahlak mulia, dan berguna bagi masyarakat.

H.Ahmad Dahlan mengupayakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan organisasi Muhammadiyah adalah pendidikan agama dengan menggunakan sistem pendidikan moderen yang sesuai dengan tuntutan zaman (Kutoyo, 1998:199). pandangan organisasi Muhammadiyah tentang pendidikan, menyangkut pola metode pendidikan Barat dan pesantren, namun berbeda dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendirian madrasah Muhammadiyah merupakan terobosan baru yang memadukan model pesantren dengan pendidikan Barat, perpaduan tersebut menghasilkan: 1) cara mengajar, menggunakan sistem klasikal sebagaimana sekolah Barat; 2) bahan pelajaran, yang diambil dari buku-buku pengetahuan umum dan juga kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama pembaharu; 3) rencana pelajaran, diatur supaya lebih teratur dan efisien; 4) pendidikan diluar kegiatan formal diatur dengan baik; 5) pengasuh dan guru, mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki; 6) hubungan guru dan murid tercipta sangat akrab.

Muhammadiyah melakukan perluasan pendidikan dengan mendirikan *Standard School* di Suronatan. Muhammadiyah kemudian mengembangkan sekolah dasar didaerah Yogyakarta, seperti di Karangakajen, Busasran, Ngadiwitan dan tempat-tempat lain di Yogyakarta. Muhammadiyah juga memajukan sekolah model kolonial, yaitu: *Kweeksschool* Muhammadiyah, *Hollansch Inlandsch Kweeksschool* Muhammadiyah di Jetis Yogyakarta dan MOSVIA Magelang, diajarkan pendidikan agama secara kontikuler (Salam, 1965: 97). Tahun 1921 didirikan pondk Muhammadiyah , yang dilengkapi dengan asrama untuk siswa-siswa yang berasal dari luar Yogyakarta, yang merupakan cikal bakal sekolah calon guru yang telah dirintis pada tahun 1918. Tahun 1922 terjadi penambahnan sekolah yang dimiliki Muhammadiyah, jumlah anggota yang semakin bertambah. Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1922 mendirikan *HIS Met De Qur'an* yang terinspirasi dari penyelenggaraan *HIS Met De Bijbel* oleh kalangan Gereja Khatolik dan Protestan. Pendidikan Muhammadiyah semakin berkembang, akhir tahun 1923 Muhammadiyah membangun empat sekolah dasar dengan sistem sekolah

gubernemen di Yogyakarta, mendirikan HIS di Yogyakarta dan Batavia, mendirikan sekolah pendidikan guru dan mendirikan sekolah yang bersifat agama seperti sekolah di Minangkabau untuk memperbaiki pengajian Al Qur'an yang tradisional.

### 1. 3. Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah

K.H.Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum dan materi pendidikan meliputi: a) pendidikan moral, ahlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah; b) pendidikan individu, sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran Individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek serta antara dunia dan akhirat; c) pendidikan kemasyarakatan, sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat (Sutarno, 2005: 33). aspek kurikulum dari pendidikan Muhammadiyah lebih menekankan terhadap usaha modernisasi dan pembaharuan dalam pendidikan. Tujuan pendidikan lebih difokuskan pada pembentukan ahlak manusia. Penyelenggaraan pendidikan menurut K. H.Ahmad Dahlan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Komponen mata pelajaran dalam sekolah Muhammadiyah tahun 1923 rencana pengajaran Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 1. Komponen mata pelajaran dalam sekolah Muhammadiyah tahun 1923 rencana pengajaran Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta

No	Mata Pelajaran	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	Jumlah
A	Agama:						
1	Tauhid	1	2	1	2	2	8
2	Al- Qur'an	(6)	(5)	(3)	(3)	(3)	(20)
	a. a. Hafalan	2	2	-	-	-	4
	a. b. Membaca	2	-	-	-	-	2
	a. c. Tajwid	-	-	-	-	1	1
	a. d. Terjemah	2	3	3	-	-	8

	a. e. Tafsir	-	-	-	3	2	5
3	Hadits / Musthalah	2/-	2/-	2/-	2/1	2/1	10/2
4	Fiqh / Usul	2/-	2/-	2/-	2/1	2/1	10/2
5	Tarikh	1	1	1	1	1	5
B	Umum						
6	Bahasa Arab	(9)	(6)	(6)	(4)	(5)	(30)
	a. a. Muthala'ah	3	2	3	2	3	14
	a. b. Imlak	2	-	-	-	-	2
	a. c. Nahu/Sharaf	2	2	2	2	2	10
	a. d. Chat	2	1	1	-	-	4
7	Bahasa Indonesia	4	4	4	3	3	18
8	Bahasa Inggris	4	3	3	4	4	17
9	Ilmu Pasti	(3)	(4)	(5)	(2)	(2)	(16)
	a. a. Aljabar	2	2	2	2	2	10
	a. b. Ilmu Ukur	1	2	3	-	-	6
10	Berhitung/I. Hitung	2/-	1/-	1/-	1/-	-/1	5/1
11	Hitung Dagang	-	-	1	1	-	2
12	Peng. Dagang	-	-	1	1	-	2
<b>No</b>	<b>Mata Pelajaran</b>	<b>KI 1</b>	<b>KI 2</b>	<b>KI 3</b>	<b>KI 4</b>	<b>KI 5</b>	<b>Jumlah</b>
13	Ilmu Alam	-	2	2	2	-	6
14	Ilmu Hajat/Hegien	-	2	2	2	-	6
15	Ilmu Bumi	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(10)
	a. a. Peng. Peta	2	2	1	1	-	6
	a. b. Alam/Pasti	-	-	-	1	1/1	2/1
	a. c. Ekonomi	1	-	-	-	1	1
16	Sejarah Indonesia/Umum	1	2	2	2	2	9
17	Tata Negara	-	-	-	1	1	2
18	Menulis Latin	1	1	-	-	-	2

19	Menggambar	1	1	1	-	1	4
20	Seni Suara	1	1	1	1	1	5
21	Pendidikan Jasmani	1	2	2	2	2	9
22	Ilmu Guru	(-)	(-)	(-)	(3)	(6)	(9)
	a. a. Ilmu Mendidik	-	-	-	2	4	6
	a. b. Ilmu Jiwa	-	-	-	1	2	3
23	Ekonomi/ Etnologi	-	-	-	1/1	1/1	2/2
24	Filsafat	-	-	-	1	1	2
25	Kemuhammadiyah	-	-	1	1	1	3
26	Kepanduan	-	-	-	2	2	4
	Jumlah	42	43	42	44	47	218

Sumber: (Mulkan, 1990: 38-39)

## **Dampak Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah bagi Pendidikan Masyarakat di Indonesia**

Muhammadiyah dalam membangun budaya baru ditengah paradigma tradisionalisme dengan strategi tabligh. Budaya tabligh yang diubah Muhammadiyah adalah kecenderungan umum para ulama yang memiliki tradisi *oral* (lisan) dalam menyampaikan dakwah. Hasil dari pembaharuan pendidikan Muhammadiyah, mengubah tradisi lisan menjadi budaya tulis menulis. Salah satu warisan model pembaharuan pendidikan Muhammadiyah adalah Integralistik, pendidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum pada jenis dan tingkat an sekolah. Pendidikan Muhammadiyah juga mengembangkan pendidikan kontekstual melalui proses penyadaran, yang memiliki konsep pendidikan yang berelevansi dengan lingkungan kehidupan. Tokoh modernis yang lahir akibat pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah antara lain K.H. Abdul Razzaq Fachruddin, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan M. Rasjidi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya Muhammadiyah terdapat dua sistem pendidikan yaitu; sekularisme pendidikan dan tradisionalisme pendidikan Islam (Pesantren). Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan rakyat pribumi, dalam pembelajarannya hanya mengenal ilmu agama. Pendidikan tradisional berinduk pada legitimasi masyarakat, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pendidikan Barat adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, dalam pengajarannya bersifat sekuler atau tidak diberi pelajaran agama. Pendidikan Belanda yang sekuler berinduk pada legitimasi pemerintah.

Usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 antara lain:

- a. prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yaitu *humanis – religius*. Prinsip pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah yang dijalankan oleh K.H.Ahmad Dahlan disesuaikan pada prinsip yang mendasar pada Al Qur'an dan Sunnah.
- b. memadukan sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren dalam pendidikan Muhammadiyah. Penyelenggaraan pengajaran Muhammadiyah mengambil unsur-unsur sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional. Sistem pengajaran menirukan sekolah model Barat, tetapi dalam pengajaran dimasukkan pelajaran agama.
- c. memperbaiki kurikulum pendidikan dalam pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah adalah gabungan yang menghasilkan teknik pendidikan baru dengan enam pokok penting yang menyangkut *Didaktik-metodik* dan *Policy Pengajaran* yang terdiri dari enam pokok; 1) cara mengajar dan cara belajar, 2) bahan-bahan pelajaran, 3) rencana pelajaran, 4) pendidikan diluar waktu belajar, 5) pengasuh / guru, 6) hubungan guru dengan murid.

Dampak pembaharuan pendidikan Muhammadiyah bagi pendidikan dapat kita rasakan sampai saat ini. Salah satu warisan model pembaharuan pendidikan Muhammadiyah adalah integralistik. Model pendidikan integralistik yang dipakai

Muhammadiyah yaitu pendidikan yang menintegrasikan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum pada jenis dan tingkatan sekolah. pendidikan Muhammadiyah mengembangkan pendidikan konstektual melalui proses penyadaran. metode pembelajaran yang digunakan Muhammadiyah telah mencetak murid-murid yang kompeten, siswa bukan sekedar mengajarkan ilmu- ilmu umum saja tetapi juga mengajarkan pendidikan watak dan penghayatan Islam yang murni. Cara penyelenggaraannya proses belajar mengajar tidak dilaksanakan dimasjid atau langgar, tetapi digedung khusus yang dilengkapi meja kursi dan papan tulis yang sampai saat ini tetap digunakan diberbagai tingkat dan jenis sekolah, baik sekolah yang didirikan pemerintah atau sekolah dibawah naungan agama dan Muhammadiyah. Pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah melahirkan golongan modernis Islam antara lain K.H. Abdul Razzaq Fachruddin, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan M. Rasjidi.

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang disampaikan oleh peneliti adalah: (1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sejarah mengenai usaha Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan Pendidikan di Indonesia; (2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia pada tahun 1912-1923.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (1) Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku dosen pembimbing I, serta Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi, dan pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi dan artikel ilmiah; (2) Dr. Mohammad Na'im, M.Pd., selaku dosen penguji I, serta Drs. Sumarjono, M.Si., selaku dosen penguji II, yang telah memberikan masukan dan evaluasi dalam penyempurnaan skripsi; (3) kedua orang tua yang telah memberi doa, semangat, dan kesabaran, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baudet, H. & I.J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terjemahan: Amir Sutarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunawan, A.H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamka, R. 1986. *Etos, Iman, Ilmu, dan Amal dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas
- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kutoyo, S. 1998. *Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulkan, A.M. 1990. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah: dalam Prespektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niel, R.V. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan: Zahara Deliar Noer. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- PP Muhammadiyah. 1995. *Sejarah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.
- Salam, S. 1965. *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: N.V. Mega.
- Salindri, D. 1990. Peranan Elite Intelektual dalam Pergerakan Nasional Indonesia 1908- 1945. *Laporan Penelitian*. Jember: Universitas Jember.
- Soetedja, B. 1956. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Steen Brink, K.A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Cetakan: II. Jakarta: LP3ES.
- Suminto, A. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: (P3BT).
- Sutarno. 2005. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Thompson, P. 2012. *Siaran dari Masa Silam (Teori dan Metode Sejarah Lisan)*. Yogyakarta: Ombak.